

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan alternatif pemasukan bagi pendapatan daerah. Terkait dengan hal itu, dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pariwisata pedesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan, baik dalam hal objek lokasi, fungsi, skala maupun karakternya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya. Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.¹

Salah satu konsep pembangunan pariwisata yang cukup berhasil dewasa ini adalah terkait dengan pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu adalah 1) memberdayakan masyarakat melalui suatu pembangunan pariwisata, 2) meningkatkan

¹ Damanik, Janianton. 2005. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press. Hlm.26

peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata tersebut, 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.²

Untuk melaksanakan pembangunan yang sudah di rencanakan, maka pemerintah tentu melakukan sejumlah strategi yang digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan Pembangunan ini tentu saja dengan metode *Top Down* maupun *Bottom Up*. Dengan Metode *Top Down* dimana Pemerintah yang memberikan arahan atau petunjuk pembangunan yang biasanya berasal dari RPJMD atau Program Nasional. Sedangkan *Bottom Up* ini melalui sinergi dari bawah yakni dari proses Musyawarah Pembangunan dalam Masyarakat.

Masyarakat melalui pemberdayaan diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan yang ada di sekitarnya maupun juga berdampak pada kepentingan atau kebutuhan.³

Selain itu ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting dalam pengembangan pariwisata. *Pertama*, Masyarakat merupakan fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, oleh karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. *Kedua*, partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. *Ketiga*, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. *Keempat*, partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan

² Munawaroh , Rina.2017. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Suwanti, Magelang.*” Jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Vol.6, No.4. Hlm.2

³ Adisasmita, Rahardjo.2013. “*Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*”. Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm. 11

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah.⁴ Itulah sebabnya mengapa memberdayakan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan, baik itu dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Termasuk dalam proses pembangunan, atau pengembangan pariwisata.

Salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bidang pariwisata adalah melalui pengembangan objek pariwisata atau yang biasa di kenal sebagai desa wisata. Melalui desa wisata ini, perekonomian masyarakat perdesaan di angkat dengan kegiatan pariwisata yang dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada di perdesaan serta ciri khas budaya setempat dengan kata lain pengembangan kegiatan pariwisata tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat perdesaan yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya.⁵

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut.⁶

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan

⁴ *Ibid.* Hlm.23

⁵ Safitra, Ariga Rahmad dan Fitri Yusman. 2014. "Pengaruh Desa Wisata Kandri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kandri Kota Semarang." Jurnal Teknik PWK Vol.3 No.4 Hlm. 909

⁶ Jafar, Ade.2017. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi Masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat.* Jurnal Prosiding Ks: Riset & PKM, Vol.4 No.2 Hlm.4

tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.⁷

Begitu banyak dampak yang di timbulkan dari adanya konsep pengembangan pariwisata dengan suatu *role* model berupa Desa Wisata. Dampak yang sangat berkaitan erat dengan perekonomian masyarakat selain pada sektor perdagangan dan industri. Peluang peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga pengembangan objek wisata daerah dalam satu stimulan berupa Desa Wisata tersebut di tangkap oleh salah satu kota di Jawa Tengah yang juga merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah ini.

Dalam pengembangan potensi wisata di Kota Semarang, Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407/tanggal 21 Desember 2012 diputuskan bahwa Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagai Desa Wisata berbasis daya tarik alam dan berbasis daya tarik seni budaya. Sebelum adanya Desa Wisata di Kandri, wilayah ini hanya berupa lahan pertanian dan perkebunan yang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Masyarakat hanya mendapatkan pendapatan dari hasil pertanian. Manfaat dari hasil lahan pertanian dan perkebunan tersebut belum menjangkau ke semua masyarakat di Kandri. Hasil ini hanya dapat menguntungkan penghasilan dan pendapatan masyarakat yang hanya

⁷ Urmila, Made Heny. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana-Bali. Vol.3 No. 2, Hlm. 117

memiliki lahan pertanian itu saja. Peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi waduk jati barang membuat kebanyakan masyarakat kehilangan mata pencahariaanya.⁸

Pembuatan wisata digital di kampung wisata Talun Kacang RT.05 RW.03 ini berawal dari adanya wacana pembangunan waduk jatibarang oleh pemerintah kota Semarang. Pembangunan waduk ini menggunakan lahan pertanian masyarakat desa Kandri terutama warga Talun Kacang RT.05 RW.03. Lahan sawah yang digunakan ini merupakan lahan yang di gunakan untuk pertanian dan sebagai mata pencaharian dari warga sekitar. Dengan adanya proyek pembangunan ini, tentu saja masyarakat menjadi kehilangan mata pencahariannya sebagai petanian.

Kehilangan pekerjaan karena lahan pertaniannya di alih fungsikan sebagai waduk membuat masyarakat kemudian berfikir pekerjaan apa yang cocok untuk mereka. Dengan menangkap peluang adanya pembangunan waduk jatibarang membuat masyarakat Talun Kacang yang semula bermata Pencaharian sebagai petani beralih profesi sebagai nelayan.

Selain sebagai nelayan, berbicara Kondisi geografis kampung Talun Kacang yang berada di dataran tinggi dan memiliki pemandangan yang indah membuat masyarakat kampung Talun Kacang berinisiatif untuk membuat suatu tempat yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang nampak begitu estetika dan indah dengan bermodalkan kondisi geografis tersebut. Di buatlah suatu tempat yang menyajikan keindahan waduk jati barang dengan kombinasi konsep yang cukup menarik dari beberapa objek modern atau yang biasa disebut oleh masyarakat kota semarang sebagai sebagai wisata spot foto.

Dengan adanya inisiatif masyarakat untuk membuat wisata spot foto di Kampung wisata Talun Kacang ini menjadi salah satu bentuk sikap partisipatif masyarakat yang cukup berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan sebagai suatu bentuk inisiatif yang cukup bagus dalam menyikapi problematika yang di hadapi dari dampak

⁸ *Ibid.* Hlm. 909

pengalihfungsian lahan pertanian mereka menjadi area Waduk. Berbicara terkait dengan pengembangan yang dimaksudkan disini adalah dimana masyarakat Kampung Talun Kacang memiliki inisiatif yang berupa suatu bentuk ide yang dapat menambah nilai daya tarik wisata yang secara langsung berdampak pada peningkatan pengunjung Desa Wisata Kandri dan Objek Wisata Goa Kreo.

Desa Wisata yang berada di Kota Semarang sendiri ada lima desa yaitu (1) Desa Wisata Kandri Terletak di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berdampingan dengan obyek wisata Bendungan Jatibarang. Tempat ini memiliki obyek wisata terkenal lain yaitu Goa Kreo yang masih alami dan dihuni puluhan monyet Jawa berekor panjang. Pengunjung dapat menikmati kuliner tradisional seperti getuk ketek yang terbuat dari bahan singkong, tape singkong, tape dodol, serta makanan ringan yang terbuat dari tepung moca. Disamping itu, warga Desa Kandri masih mempertahankan kebudayaan lokal seperti Ketoprak, Wayang Kulit, Wayang Suket (rumput), dan pertunjukan lesung sebagai pertunjukan seni ; (2) Desa Wisata Nongkosawit Masih di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, terdapat Desa Wisata Nongkosawit yang memiliki pemandangan indah dengan lembah dan ngarai. Desa Wisata Nongkosawit memiliki potensi pertanian dan buah buahan seperti durian montong, jeruk, buah naga dan rambutan juga peternakan sapi perah, ayam, tikus putih, dan domba. Serta pertunjukan kesenian tari tradisional si Golo-Golo dan Kuntulan yang dibawakan masyarakat setempat. Selain itu, Desa Wisata Nongkosawit memiliki agenda rutin tahunan berupa Kirab Kyai Bende dan upacara- upacara adat setempat ; (3) Desa Wisata Wonolopo Desa Wonolopo terletak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang dengan agrowisata seperti durian, salak, jambu biji, dan pepaya sebagai potensi utamanya. Wisata desa ini juga terkenal dengan pembuatan jamu tradisional. Pengunjung disugahi cara pembuatan jamu tradisional. Di Desa Wisata Wonolopo juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung berupa homestay dan permainan outbound ; (4) Desa Wisata

Sodong Desa Wisata Sodong terletak di Desa Sodong Kecamatan Mijen yang terkenal dengan kampung anggrek karena terdapat banyak ragam anggrek di desa tersebut. Pengunjung juga dapat belajar budidaya dan belajar memanen anggrek. Selain anggrek, Desa Wisata Sodong juga menawarkan wisata budaya berupa petilasan Sunan Kalijaga, camping ground, homestay, dan wisata edukasi ; (5) Desa Wisata Kampung Jamalsari Kampung Jamalsari terletak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang berada di tepi bendungan Jatibarang. Kampung Jamalsari menggunakan lahan seluas enam hektar tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwanan dan lahan masyarakat Jamalsari sebagai obyek wisata. Pengunjung dapat menikmati wisata alam dan wisata air di atas bendungan. Selain permainan air di waduk, terdapat juga bumi perkemahan, outbound, homestay, kebun anggrek, pertunjukan seni budaya, sanggar batik, dan sanggar kerajinan lampion, pembuatan tape, dan pembuatan keripik kulit singkong.⁹

Salah satu desa wisata yang berkembang karena adanya pemberdayaan masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang turut berkontribusi secara aktif dalam pengembangannya adalah Desa Wisata Kandri yang berada di kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Desa Wisata Kandri mempunyai luas wilayah 245,490 ha dan terbagi menjadi 4 RW dan total ada 26 jumlah RT. Dari keempat RW tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Di RW 1 ada yang dinamakan Desa Edukasi yang dijadikan sebagai Kampung Inggris dan pendidikan alam. Di RW II sebagai arena perkebunan yang dilengkapi dengan aneka buah, dimana juga dijadikan sebagai tempat untuk outbond. Kemudian di RW III sebagai kawasan budaya yang sebelumnya untuk pementasan kesenian berupa wayang kulit, wayang suket, jatilan, watu lumpang dan kesenian lesung, sementara di RW IV banyak dihuni oleh masyarakat yang menjajakan makanan khas berpotensi

⁹ Utomo, Teguh. Dkk. 2017. *Need Assessment Desa Wisata Menuju Ecotourism Studi Kasus: Kecamatan Gunungpati*. Jurnal: Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Hlm. 4-5

sebagai wisata kuliner, meliputi dodol tape, kripik kulit pisang dan cake tape.¹⁰ Jumlah pengunjung juga meningkat dari tahun ke tahun seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Pengunjung Desa Wisata Kandri Tahun 2014-2015

No	Tahun	Wisata Domestik	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1.	2014	1270 Orang	25 Orang	1295 Orang
2.	2015	3392 Orang	36 Orang	3428 Orang

(Sumber : Dokumen POKDARWIS Pandanaran Kelurahan Kandri, Tahun 2015)

Dalam paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat tersebut menuntut perubahan pendekatan dari pendekatan *top down* yang selama ini mendominasi proses pembangunan menjadi *bottom up*.¹¹ Pendekatan ini sangat sesuai dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dan merupakan hal-hal pokok yang harus dijalankan. Melalui pendekatan ini diharapkan pembangunan kepariwisataan menjadi dapat lebih diterima dan mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab sebagai pelau dan penentu pembangunan kepariwisataan dalam skala lokal. Pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata dan pemahaman bahwa produk wisata merupakan proses rekayasa sosial masyarakat merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pada komunitas atau masyarakat (*community based development*).¹²

¹⁰ Tofan, Muhammad. “Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”.Jurnal Administrasi Publik. Vol.3 No. 2 Tahun 2004 Hlm.1

¹¹ Tofan, Muhammad. “Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”.Jurnal Administrasi Publik.Vol.3 No. 2 Tahun 2004. Hlm. 2

¹² *Ibid.* Hlm. 3

Pengembangan desa wisata ini untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah khususnya kota Semarang, apalagi dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat baik, terlihat dari alokasi bantuan dan pengembangan yang juga mengalami peningkatan. Desa wisata adalah Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Proses terbentuknya Kandri menjadi sebuah desa wisata bermula dari keinginan yang kuat dari masyarakat desa tersebut.

Menurut Walikota Semarang Hendrar Prihadi dalam Kegiatan Jalan Sehat Di Desa Wisata Kandri Jumat, 19 Januari 2018, Peningkatan Pariwisata di Semarang sendiri tidak terlepas dari adanya Desa Wisata Kandri yang memiliki beberapa Objek wisata digital untuk menarik wisatawan datang karena menawarkan suasana yang menarik untuk diunggah diberbagai media sosial. Wisata Digital ini berasal dari inovasi masyarakat RT.05 RW.03 Desa Kandri yang lebih tepatnya terletak di Kampung Wisata Talun Kacang yang notabennya berada di sekitar wilayah Wisata Goa Kreo. Wisata Digital sendiri merupakan sebuah wisata yang menawarkan daya tarik digital bagi para wisatawan yang menginginkan wisata swa foto,¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, Fokus penelitian ini pada Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan wisata digital di Desa Kandri, Kota Semarang. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan wisata digital ini tidak terlepas dari peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Suko makmur. POKDARWIS Sukomakmur yang notaben

¹³ Sigit. *Kandri Jadi Desa Wisata Digital*. JATENG POS.co.id : 20 Januari 2018

anggotanya merupakan warga masyarakat Kampung Wisata Talun Kacang yang terletak di RT.05 RW.03. Membentuk POKDARWIS Sukomakmur ini dengan sejarah yang cukup singkat untuk kemudian terbentuk menjadi suatu POKDARWIS yang mampu merangsang pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembangunan objek wisata di Desa Kandri.

Dengan adanya pembangunan Wisata digital ini juga di tujukan sebagai objek wisata pendukung destinasi wisata Goa Kreo. Pembangunan objek wisata digital yang dimaksudkan disini adalah terkait dengan Inisiatif yang berasal dari masing-masing masyarakat untuk membuat suatu objek wisata yang berbeda dari objek lainnya yang ada di kampung Talun Kacang dibawah arahan dari POKDARWIS Suko Makmur ini.

Masyarakat kampung Talun Kacang mendapatkan ide untuk mengembangkan objek wisata tersebut justru berasal dari *Buttom Up*, yang merupakan pengembangan yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri. Terkait dengan kampung wisata Talun Kacang ini sepenuhnya pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Setempat dengan dibentuknya beberapa pengurus dari hasil rapat desa.

Adanya perkembangan zaman justru menginisiasi masyarakat di Kampung Wisata Talun Kacang RT.05/RW.03 untuk memanfaatkan lahan yang berada disekitar pekarangan rumah mereka untuk dijadikan sebagai objek wisata baru bertemakan “wisata digital” yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka dan daya tarik tersendiri untuk mengunjungi objek wisata goa krejo yang notabennya di kelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa peneliti lebih tertarik untuk meneliti pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan wisata digital di Desa Kandri jika dibandingkan dengan Desa lainnya.

Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan wisata digital ini tentu memerlukan manajemen pembangunan yang tepat, manajemen pembangunan sendiri merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem perencanaan dan penganggaran, sistem

pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan suatu objek wisata tentu membutuhkan manajemen pembangunan yang tepat agar dapat sesuai dengan tujuan yang di harapkan termasuk didalamnya terkait dengan adanya berbagai aktifitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Wisata Digital di Desa Kandri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Proses dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana tentang peningkatan ekonomi kemasyarakat di berbagai daerah di indonesia terutama mengenai

kajian Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan objek wisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan maupun pengembangan pariwisata, lebih khusus bagi mereka yang akan mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata dan dapat digunakan sebagai pengayaan materi pengajaran dan Penelitian-Penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah terkait dengan peningkatan ekonomi kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan objek wisata atau pengembangan sektor pariwisata. Dimana dengan adanya pemahaman pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan dan pengembangan pariwisata ini pemerintah daerah memahami dan berupaya untuk mengembangkan objek pariwisata bersama dengan masyarakat dan *stakeholders* terkait dengan menggunakan manajemen pembangunan yang tepat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah dengan sangat baik

B. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat memberikan pengalaman yang mengasah keterampilan peneliti. Karena dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, maka peneliti akan dapat berinteraksi langsung dengan subjek-subjek

penelitian untuk mempelajari gejala-gejala yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang konsep peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan objek wisata.

C. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang ada di daerahnya melalui konsep pemberdayaan masyarakat sehingga di harapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif untuk turut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata lainnya yang cukup berpotensi dengan menggunakan konsep strategi pemberdayaan masyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan untuk menghindari duplikasi, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di kota Semarang belum ada yang mengkaji. Akan tetapi sudah ada hasil karya ilmiah yang relevan dengan kajian yang penulis teliti, hanya saja objek yang dikaji sangat berbeda.

Tabel 1.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama, judul	Teori	Metode	Hasil
-------------	-------	--------	-------

<p>Ika Dewani (2017) “Kerjasama Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) Dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pandanaran Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Kandri Semarang</p>	<p>Pemberdayaan, Kemitraan</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan POKDARWIS Pandanaran ini mampu memberikan kontribusi yang positif yaitu memberikan pembekalan kepada masyarakat Kandri dalam pengembangan Pariwisata Desa Kandri</p>
<p>Aulia Rizki Nabila dan Tri Yuningsih (2016) “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang”</p>	<p>Manajemen Publik, Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Konsep Pariwisata, Pengembangan Pariwisata</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang adalah pseudo-participation atau partisipasi semu dan Tingkatan partisipasi masyarakatnya berada pada tingkatan paling tinggi yaitu Citizen Power.</p>
<p>Muhammad Tofan, Ari Subowo dan Maesaroh (2014) “Strategi Pengembangan Obyek Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”</p>	<p>Manajemen, Strategi, Perencanaan, Desa Wisata.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Kondisi desa wisata Kandri kota Semarang secara keseluruhan dari segi fisiknya masih perlu sentuhan, perhatian dan pembangunan yang lebih lagi serta terdapat beberapa kendala dalam pengembangan desa wisata Kandri.</p>
<p>Fatimah Alfiani (2016) yang berjudul “Analisis Kemitraan dalam pengelolaan desa wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”</p>	<p>Kemitraan, Desa Wisata, Dampak Kemitraan dalam pengelolaan desa wisata, Desa Wisata</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri adalah POKDARWIS Pandanaran yang mempunyai peran sangat sentral dalam mewujudkan Kemajuan Desa Wisata Kandri. Jenis Kemitraan yang ada di Desa Wisata Kandri merupakan jenis Kemitraan semu (<i>Pseudo Partnership</i>) dengan kondisi <i>as usual</i> dan belum berkelanjutan.</p>

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pemberian kekuatan dan kemampuan yang dilakukan oleh pihak atau seseorang yang memiliki daya kepada orang yang kurang atau belum berdaya. Proses pemberdayaan mempunyai arti bahwa proses pemberdayaan adalah serangkaian tindakan atau langkah langkah yang sistematis yang ditujukan untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang produktif dan berdaya.

Menurut Sumodinigrat berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pemberian kekuatan agar masyarakat atau yang bersangkutan dapat berdaya, produktif dan bergerak secara mandiri.¹⁴

Pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah proses yang menciptakan agar masyarakat dapat berkembang dan bergerak secara mandiri memaksimalkan potensi yang ada. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak meyakini atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya

¹⁴ Ambar, Teguh (2004). *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Hlm. 78

pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*). Pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.¹⁵

1.6.1.2 Tujuan pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan yang kan dicapai yaitu untuk membentuk masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya kemandirian ekonomi, kemandirian bertindak, kemandirian berpikir dan kemampuan untuk mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, berdikari dan sejahtera dalam ekonominya, untuk menjadi masyarakat mandiri dibutuhkan kemampuan kognitif, konotatif, psikomotorik, dengan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju masyarakat mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif dan sumber daya lainya yang bersifat fisik- material.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, untuk mrncapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kamandirian mereka, apa yang diharapkan daripemberdayaan merupakan visualisasi dari pembangunan sosial yang

¹⁵ Tri Winarni (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam orientasi pembangunan masyarakat desa Menyongsong Abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta : Aditya Media. Hlm.76

diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

16

1.6.1.3 Tahapan-Tahapan pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat, Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi.¹⁷ Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi¹⁸:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

¹⁶ Ambar, Teguh (2004). *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Hlm. 80

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 82

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 83

Selain itu tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut sebagai berikut :

1. Tahap Seleksi lokasi atau wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak atau organisasi tertentu terkait masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang di harapkan.

2. Tahap sosialisasi pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak yang terkait dengan program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi penting, karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (Berperan dan terlihat) di dalam program pemberdayaan masyarakat yang ditentukan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut :

A. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik dalam mengidentifikasi serta menganalisa

keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi :

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
- b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
- c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
- d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

B. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian meliputi :

- a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
- b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
- c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
- d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.

C. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengawasan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

D. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*Participatory Monitoring and Evaluation*) /PME

Participatory Monitoring and Evaluation ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. *Participatory Monitoring and Evaluation* adalah proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat di susun proses perbaikan kalau diperlukan.

4. Pemandirian Masyarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah berupaya pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya karena prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *Self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu meberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga di dampingi oleh satu tim fasilitator yang bersift multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran Fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemunduruan tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

1.6.2 Teori Manajemen Pembangunan

1.6.2.2 Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, “*maneggio*”, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁰

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).²¹

Johnson, sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan bahwa manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.²²

¹⁹ Sadili, Samsudin (2006). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Hlm. 15

²⁰ Hasibuan, Malayu S.P. (2001). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Hlm.23

²¹ Handoko, Hani (1999) ”*Manajemen*” Hlm.72

²² *Ibid* Hlm. 82

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”²³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

1.6.2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai”.²⁴

²³ *Ibid* Hlm. 83

²⁴ *Ibid* Hlm. 84

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik.²⁵

Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

Menurut G.R. Terry, *Planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁶

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan

²⁵ Hasibuan, Malayu S.P. (2001). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Hlm.2

²⁶ Purwanto, Djoko. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Hlm. 45

adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.²⁷

2) Pengorganisasian

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian (*organizing*) adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan., 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.²⁸

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.²⁹

3) Penggerakkan

²⁷ Hasibuan, Malayu S.P. (2001). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Hlm.79

²⁸ *Ibid*, Hlm.24

²⁹ *Ibid*. Hlm. 23

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatankegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian.³⁰

4) Pengawasan

Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan.

Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.³¹

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem

³⁰ Purwanto, Djoko. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Hlm. 58

³¹ *Ibid*, Hlm.67

pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.³²

1.6.2.4 Manajemen Pembangunan Pariwisata

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Inskip, terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

33

1. *Continous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor *feed back* yang ada.
2. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem.
3. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk

³² Handoko, Hani (1999) "Manajemen" Hlm. 373

³³ Inskip, Edward. 1991. *Tourism Planning : An Intergrated and sustainable Development approach*. Hlm.29

didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.

4. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
5. *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajementi dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
6. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
7. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.

8. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas. *Goals* biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal, dan mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah. Sementara *objectives* adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual. *Objectives* bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai *goal-goal* pembangunan. Jadi *objectives* harus lebih realistis, dapat diukur dan mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Godfrey dan Clarke proses membentuk strategi pariwisata terdiri dari tiga langkah, yaitu:

- 1) *Identifying Opportunities and Constraints (Based on an evaluation of supply and demand).*
- 2) *Setting development Goals and Objective (Addressing issues needing attention in the short, medium and longer term).*
- 3) *Define a series of action steps (Designed to achieve the goals and objectives within some specified time frame).*

Sedangkan Jamieson dan Noble menuliskan beberapa prinsip penting dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu:

1. Pariwisata tersebut mempunyai prakarsa untuk membantu masyarakat agar dapat mempertahankan kontrol/ pengawasan terhadap perkembangan pariwisata tersebut.

2. Pariwisata ini mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas kepada dan dari masyarakat setempat dan terdapat pertalian yang erat (yang harus dijaga) antara usaha lokal dan pariwisata.
3. Terdapat peraturan tentang perilaku yang disusun untuk wisatawan pada semua tingkatan (nasional, regional dan setempat) yang didasarkan pada standar kesepakatan internasional. Pedoman tentang operasi pariwisata, taksiran penilaian dampak pariwisata, pengawasan dari dampak kumulatif pariwisata, dan ambang batas perubahan yang dapat diterima merupakan contoh peraturan yang harus disusun.
4. Terdapat program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menjaga warisan budaya dan sumber daya alam yang ada.

Menurut Hadinoto, ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, diantaranya adalah:

a. Atraksi Wisata

Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

b. Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.

c. Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata)

Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

d. Transportasi

Pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.

e. Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Faizun dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup sebelum ada kegiatan pariwisata dan setelah ada kegiatan pariwisata.³⁴

Identifikasi Dampak diartikan sebagai suatu proses penetapan mengenai pengaruh dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi terhadap masyarakat sebelum ada pengembangan pembangunan dan setelah adanya pengembangan pembangunan.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat

³⁴ Faizun, M. 2009. *Dampak Perkembangan Kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Jepara*. Hlm. 34

setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pariwisata tentu saja akan memberikan dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat dapat menimbulkan dampak atau pengaruh positif maupun negatif dan yang terkena dampak tersebut adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi, serta sosial.³⁵

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Cohen secara teoritis mengemukakan dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikelompokkan ke dalam delapan kelompok, yaitu:³⁶

1. Dampak terhadap penerimaan devisa

³⁵ Mathieson, Wall. 1982. *Tourism : Economics, Physical and Social Impacts*. London and New York Press

³⁶ Pitana & Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Press Hlm. 185

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga dan tarif
5. Dampak terhadap distribusi manfaat keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian
7. Dampak terhadap pembangunan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

Sedangkan menurut Ritchie, pariwisata juga menimbulkan beberapa dampak sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah:³⁷

- 1) Ketidak tergantungan ekonomi
- 2) Perpindahan tenaga kerja
- 3) Perubahan dalam pekerjaan
- 4) Perubahan nilai lahan
- 5) Peningkatan standar hidup

Menurut Robert Cristie Mill, Secara ringkas kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak positif atau negatif di bidang ekonomi. Dampak positifnya di antaranya adalah :

1. Terbuka lapangan pekerjaan baru
2. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
4. Membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat

³⁷ Mill, Robert Cristie. 2000. *Toursim : The International Bussiness*. Depok : Raja Grafindo Persada. Hlm. 34

5. Meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya.

Sedangkan Dampak negatif di antaranya adalah :

- 1) Meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana
- 2) Meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan-bahan pokok
- 3) Peningkatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga pendapatan masyarakat naik dan turun
- 4) Mengalirnya uang keluar negeri karena konsumen menuntut barang-barang impor untuk bahan konsumsi tertentu.

Baik secara langsung atau tidak, kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu daerah atau wilayah akan memberikan dampak terhadap masyarakat yang tinggal di daerah atau wilayah tersebut. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak fisik, ekonomi, dan sosial. Menurut Triwahyudi, terdapat beberapa manfaat utama pariwisata yaitu: ³⁸

1. Pariwisata dapat menciptakan diversifikasi produk, menjadikan ekonomi lokal tidak hanya tergantung pada sektor utama.
2. Sektor pariwisata adalah sektor yang padat karya, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar bagi generasi muda.
3. Pertumbuhan sektor pariwisata menghasilkan penambahan dan perbaikan fasilitas yang tidak hanya digunakan oleh wisatawan, tetapi juga oleh penduduk.
4. Pariwisata menciptakan kesempatan bagi munculnya produk-produk baru, fasilitas pelayanan dan pengembangan bisnis yang sudah ada.
5. Pariwisata dapat mempercepat permukiman pengembangan permukiman.

³⁸ Herdinsyah. 2012. Pengembangan Potensi Pariwisata. Jakarta : Gaung Persada. Hlm. 27

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan yang kan dicapai yaitu untuk membentuk masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya kemandirian ekonomi, kemandirian bertindak , kemandirian berpikir dan kemampuan untuk mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi ³⁹:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selain itu tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat.

Secara rinci masing-masing tahap tersebut sebagai berikut :

- 1) Tahap Seleksi lokasi atau wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak atau organisasi tertentu terkait masyarakat.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 83

Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang di harapkan.

2) Tahap sosialisasi pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak yang terkait dengan program yang direncanakan. Proses sosialisasi menjadi penting, karena akan menentukan minat atau keterkaitan masyarakat untuk berpartisipasi (Berperan dan terlihat) di dalam program pemberdayaan masyarakat yang ditentukan.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi :
 - a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
 - b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.

- d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- 2. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian meliputi :
 - a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.

3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya di implementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengawasan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*Participatory Monitoring and Evaluation*) /PME

Participatory Monitoring and Evaluation ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. *Participatory Monitoring and Evaluation* adalah proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat di susun proses perbaikan kalau diperlukan.

4) Pemandirian Masyarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah berupaya pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya karena prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud Selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga di dampingi oleh satu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran Fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

1.7.2 Manajemen Pembangunan

Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut John F. Mee fungsi manajemen adalah *Planning*, *Organizing*, *Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada

lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen dakwah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut G.R. Terry, *Planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴⁰

Sebelum mengorganisasikan, mengarahkan atau mengawasi, maka harus dibuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, diputuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.⁴¹

2. Pengorganisasian

Setelah menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Pengorganisasian (*organizing*) adalah :⁴²

- 1) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

⁴⁰ Purwanto, Djoko. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Hlm. 45

⁴¹ Hasibuan, Malayu S.P. (2001). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Hlm.79

⁴² *Ibid*, Hlm.24

- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: “Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.⁴³

3. Penggerakkan

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya adalah menggerakkan untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai. Penggerakkan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian.⁴⁴

4. Pengawasan

Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan

⁴³ *Ibid.* Hlm. 23

⁴⁴ Purwanto, Djoko. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Hlm. 58

yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.⁴⁵

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.⁴⁶

Menurut Inskeep, terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:⁴⁷

- 1) *Continous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor *feed back* yang ada.
- 2) *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan tehnik analisa sistem.
- 3) *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai

⁴⁵ *Ibid*, Hlm.67

⁴⁶ Handoko, Hani (1999) "Manajemen" Hlm. 373

⁴⁷ Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning : An Intergrated and sustainable Development Approach*. Hlm. 29

sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.

- 4) *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajementi dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
- 5) *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
- 6) *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.
- 7) *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas. *Goals* biasanya termasuk aspek-aspek seperti meningkatkan kepuasan pengunjung, diversifikasi pasar pariwisata, meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal, dan mengembangkan potensi

pariwisata suatu daerah. Sementara *objectives* adalah lebih spesifik (khusus) dan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aktual. *Objectives* bertujuan untuk mengarahkan tindakan yang akan membantu mencapai *goal-goal* pembangunan. Jadi *objectives* harus lebih realistis, dapat diukur dan mampu dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Faizun dampak pariwisata adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap masyarakat sebagai komponen dalam lingkungan hidup sebelum ada kegiatan pariwisata dan setelah ada kegiatan pariwisata.⁴⁸

Identifikasi Dampak diartikan sebagai suatu proses penetapan mengenai pengaruh dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi terhadap masyarakat sebelum ada pengembangan pembangunan dan setelah adanya pengembangan pembangunan.

Sedangkan menurut Ritchie, pariwisata juga menimbulkan beberapa dampak sosial ekonomi masyarakat, diantaranya adalah:

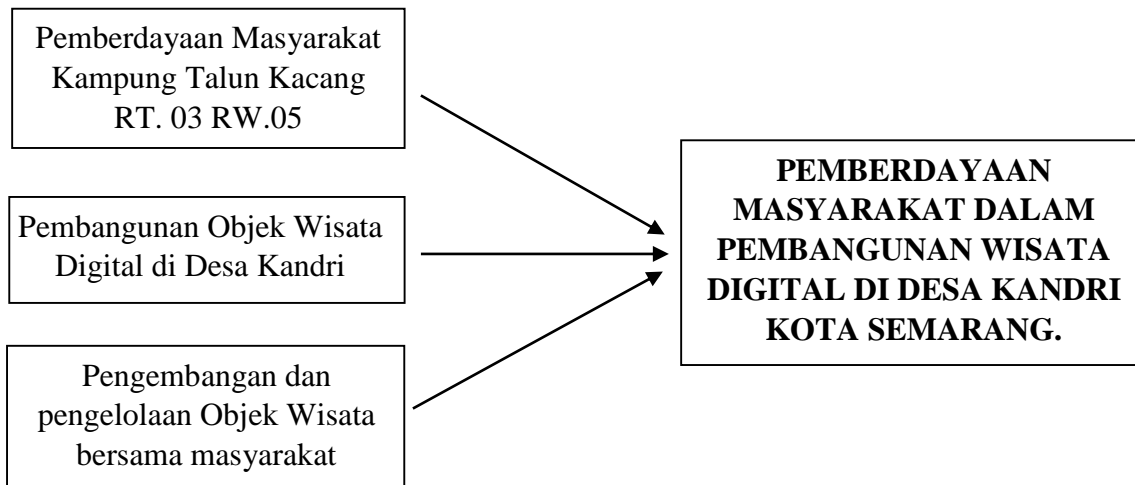
1. Ketidak tergantungan ekonomi
2. Perpindahan tenaga kerja
3. Perubahan dalam pekerjaan
4. Perubahan nilai lahan
5. Peningkatan standar hidup

1.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada tinjauan pustaka serta berbagai teori yang telah diajukan pada bagian terdahulu, maka kerangka pikiran dalam penelitian ini secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut :

⁴⁸ Faizun, M. 2009. *Dampak Perkembangan Kawasan wisata Pantai Kartini terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Jepara.*

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Pada Gambar Alur Skematik Kerangka Berfikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Wisata Digital ini berkaitan dengan kondisi dimana adanya proses pemberdayaan masyarakat Kampung Talun Kacang RT. 05 RW.03, yang beberapa kehilangan mata pencahariannya sebagai petani karena pengalihfungsian lahan sawah menjadi waduk jati barang. Kemudian menangkap permasalahan tersebut masyarakat beraliansi untuk membantuk suatu Kelompok yang bergerak dalam pengembangan dan pembangunan Pariwisata yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang di beri nama Sukoakmur. Kemudian menagkap beberapa fenomena alam yang dapat dijadikan alternatif mengatikan mata pencaharian yang hilang tersebut, kemudian POKDARWIS Sukomakmur melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan suatu pembangunan objek wisata. Objek wisata ini adalah berupa objek wisata yang memanfaatkan pemandangan indah berlatarkan waduk jatibarang yang terletak di lahan belakang rumah masyarakat atau yang lebih di kenal sebagai Wisata Digital. Yang kemudian konsep pemberdayaan masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wisata digital. Terkait dengan pengelolaan dan

pengembangan dari dibangunnya objek wisata digital ini adalah dilakukan bersama masyarakat dengan di koordinir oleh POKDARWIS Sukomakmur.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Wisata Digital ini juga berdampak pada keberadaan Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Kandri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang yang di nobatkan sebagai desa wisata. Dengan keberadaaan desa wisata Kandri yang tentunya juga ada beberapa desa wisata lainnya di Kecamatan Gunungpati ini menuntut pengembangan desa wisata Kandri untuk dapat berdaya saing dengan desa wisata lainnya. Dengan adanya wisata digital di Kampung Talun Kacang RT.03 RW.05 ini dapat memberikan pengaruh pada *Branding* daya saing dari Desa wisata Kandri di dibandingkan dengan Desa Wisata lainnya di Kota Semarang.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis berguna untuk pemecahan masalah atau mendapat jawaban tentang pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang digunakan harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain agar tidak menghasilkan kesimpulan yang merugikan. Dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk dapat memahami masalah yang menjadi objek penelitian dan memilih metode yang benar. Sehubungan dengan penelitian ini yang menggunakan langkah-langkah dalam proses penelitian yang merupakan rangkaian kegiatan, sebagai berikut :

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

organisasi dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang Proses dan strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang. Dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Masyarakat Dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang.

Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai serta ingin menekankan makna yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Berdasarkan definisi diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kampung Talun Kacang RT.03 RW.05, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran

penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian bahasa sebagai pelaku bahasa yang merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Subjek dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kota yaitu Dinas Pariwisata Kota Semarang seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataaan Bapak Jumartono dan Pemerintah tingkat Desa yaitu Kepala Kelurahan Kandri Bapak Agus Muryanto, Kasie Pemerintahan Bapak Al Frida Very, Masyarakat yang terdiri dari salah satu anggota POKDARWIS Suko Makmur Bapak Widodo, salah satu Pemilik Objek wisata Digital, serta beberapa masyarakat antara lain Mas Safari dan Mas Rizal.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk merinci kekhususan ke dalam temuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul.⁴⁹ Menurut Arikunto teknik *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian dan bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah, tapi didasarkan atas tujuan tertentu.⁵⁰

1.9.4 Jenis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Maka data yang dikumpulkan dan digunakan berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sekaligus sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip resmi yang dimiliki kedua belah pihak.

⁴⁹ Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 224

⁵⁰ *Ibid* Hlm. 117

1.9.5 Sumber Data

Lebih lanjut Arikunto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :⁵¹

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini Dinas Pariwisata Kota Semarang seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataaan Bapak Jumartono dan Pemerintah tingkat Desa yaitu Kepala Kelurahan Kandri Bapak Agus Muryanto, Kasie Pemerintahan Bapak Al Frida Very, Masyarakat yang terdiri dari salah satu anggota POKDARWIS Suko Makmur Bapak Widodo, salah satu Pemilik Objek wisata Digital, serta beberapa masyarakat antara lain Mas Safari dan Mas Rizal.
- 2) Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi mengenai riwayat kegiatan dan arsip-arsip merupakan sumber data sekunder.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah, yaitu :⁵²

- 1) *Geeting in*

Merupakan proses memasuki lokasi penelitian.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 129

⁵² *Ibid*, Hlm. 134

2) *Getting along*

Merupakan proses berada di lokasi penelitian, dimana dalam lokasi penelitian tersebut peneliti berusaha menjalin kepercayaan dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, agar informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3) *Logging the data*

Proses mengumpulkan data dari informan :

a. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Masyarakat RT 05 RW 03, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Suko Makmur dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan.

b. Observasi

Merupakan upaya pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara dan fenomena selama proses *getting along*.

c. Dokumentasi

Mencari dokumen berupa arsip-arsip yang dimiliki Kepala Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Suko Makmur dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. untuk

mendapatkan jawaban yang dibutuhkan foto, dan laporan yang sesuai dengan permasalahan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵³

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Data diperoleh dari *grand tour* dan *ministour question*. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak, oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh

⁵³ *Ibid.* Hlm. 103

peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.⁵⁴

Secara singkat tata cara analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.
- 2) Pengujian Data, data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus aktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
- 3) Menarik Kesimpulan Verifikasi, merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif.

1.9.8 Teknik Pengambilan Informan

Pencarian informan dalam penelitian ini secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan secara sengaja) untuk memperoleh *key informants* (orang-orang yang mengetahui dengan benar, terpercaya, dan benar-benar memahami konteks penelitian ini) berdasarkan tujuan penelitian. Adapun metode *purposive sampling* ini dipilih karena memiliki kelebihan dalam pemilihan kasus-kasus yang kaya informasi (*information rich cases*) untuk studi mendalam dan dapat digunakan untuk membangun perbandingan-perbandingan agar dapat menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara *setting* atau individu.. Serta, melalui metode *purposive sampling*, peneliti juga dapat memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari beberapa isu sentral.

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 256

Dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *snowball*, yakni mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui sejumlah orang yang dihubungi secara berangkai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi yang dijadikan sebagai sumber data tambahan.⁵⁵

Dalam penelitian ini adapun sampel dari penelitian ini adalah Ketua POKDARWIS Suko Makmur, masyarakat RT 05 RW 3 Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Kandri Kota Semarang dan pemilik Objek Wisata Digital, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

1.9.9 **Kualitas Data**

Untuk memperoleh hasil yang berkualitas peneliti menggunakan serangkaian proses validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁵⁶

Oleh karena itu, data dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 126

⁵⁶ *Ibid*, Hlm 117

berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dilakukan yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan wawancara mendalam terhadap informan.
- 2) Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil informasi di lapangan.
- 3) Melakukan konfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan lain atau sumber-sumber lain.